

**KEKERASAN BUDAYA PASCA 1965 DALAM NOVEL  
PULANG DAN DARI DALAM KUBUR****Aufa Hanifah**Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta  
aufahanifah39@gmail.com**Robertus Robet**Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta  
rrobet@unj.ac.id

---

**Abstract**

This study aims to describe cultural violence depicted in novels *Dari dalam Kubur* (2020) and *Pulang* (2013), both novels describe the post-1965 mass massacres in Indonesia. This study uses a qualitative approach with the method of Critical Discourse Analysis. Data collection was carried out by means of a literature study. This research is based on Johan Galtung's concept of cultural violence and Pierre Bourdieu's symbolic violence. The results showed that in both novels there was personal violence and structural violence. To legitimize these two violences, the New Order government used cultural aspects such as ideology, religion, language, art and knowledge. This is the same as the symbolic principle in Pierre Bourdieu's idea of symbolic violence or invisible violence. The use of these cultural aspects has the function of changing the moral and ideological values of the people so that they consider violence against communists and ethnic Chinese community to be normal, and even must be done.

*Keywords: Mass Massacre, Cultural Violence, Symbolic Violence*

**Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kekerasan budaya yang tergambar dalam novel *Dari dalam Kubur* (2020) dan *Pulang* (2013), kedua novel ini menggambarkan pembantaian massal pasca 1965 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Critical Discourse Analysis*. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan studi kepustakaan. Penelitian ini bertumpu pada konsep kekerasan budaya dari Johan Galtung dan kekerasan simbolik Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kedua novel terjadi kekerasan personal dan kekerasan struktural. Untuk melegitimasi dua kekerasan ini, pemerintah Orde Baru menggunakan aspek-aspek budaya seperti ideologi, agama, bahasa, seni dan pengetahuan. Hal tersebut sama dengan prinsip simbolis dalam gagasan Pierre Bourdieu mengenai kekerasan simbolik atau kekerasan tak kasat mata. Penggunaan aspek-aspek budaya tersebut fungsinya untuk mengubah nilai moral dan ideologis masyarakat agar mereka menganggap kekerasan terhadap komunis dan yang di-komunis-kan serta masyarakat etnis Tionghoa adalah normal, bahkan harus dilakukan.

*Kata Kunci: Pembantaian Massal, Kekerasan Budaya, Kekerasan Simbolik*

## Pendahuluan

Karya sastra tidak berhenti sebagai sebuah bentuk ekspresi penulis, sastra juga menghadirkan realitas sosiologis dengan beragam warna. Karya sastra lahir sebagai reaksi atas fenomena sosial yang ada di masyarakat. Kemunculannya selalu dikaitkan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada suatu jaman. Menurut Wellek dan Warren karya sastra memang berasal dari dunia subjektif manusia. Keduanya adalah teoretisi yang mempercayai bahwa karya sastra itu inovatif dan imajinatif. Namun, dunia sosial tetap menjadi titik tolak penciptaanya. Menurut Wellek dan Warren, pembahasan hubungan antara sastra dengan dunia sosial ini biasanya bertolak dari pandangan bahwa sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat (Wellek dan Warren, 2014:98-99).

Sastra sebagai salah satu bagian dari seni menurut pandangan Marxis menjadi alat untuk melakukan pemberontakan bagi kaum tertindas, dengan media ini kaum tertindas berupaya mengambil hak-hak kemanusiaannya yang telah dirampas akibat dari kelas sosial. Sementara itu, dalam perspektif Gramsci, kesusastraan sebagai bagian dari dunia gagasan dan kebudayaan tidak dipahami sebagai superstruktur yang seolah-olah hanyalah refleksi dari infrastruktur atau dasar ekonomik masyarakat. Kesusastraan dipahami sebagai kekuatan sosial, politik, dan kultural yang berdiri sendiri, meskipun memang tidak akan terlepas dari infrastruktur (Faruk, 2012:154).

Salah satu sastra yang merepresentasikan bagaimana suatu kelompok masyarakat menerima beragam kesengsaraan, kekerasan, diskriminasi adalah novel *Dari Dalam Kubur* karya Soe Tjen Marching dan novel *Pulang* karya Leila S. Kedua novel ini ditulis pada masa post 1965, sehingga penggambaran realita yang terjadi dalam latar novel dapat digambarkan secara gamblang. *Dari Dalam Kubur* dan *Pulang* menarik untuk dijadikan objek material dalam penelitian lantaran kedua novel ini menjadi representasi yang baik bagaimana masa yang kelam pernah terjadi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah, penulis ingin menguraikan konteks sosial dalam novel *Dari Dalam Kubur* garapan Soe Tjen Marching dan *Pulang* garapan Leila S. Chudori dan untuk memaparkan bentuk-bentuk kekerasan yang ada dalam cerita kedua novel ini tersebut. *Dari Dalam Kubur*

banyak dengan tokoh sentral Karla dan ibunya Djing Fei bercerita bagaimana diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Baru terjadi, juga masa di mana pemerkosaan terhadap perempuan tidak dianggap kejahatan berat, bagaimana kekerasan-kekerasan yang berbagai macam bentuk dilegalkan.

Penelitian ini ditulis menggunakan teknik Analisis Wacana Kritis. Bahasa dalam teks dan konteks selain alat untuk praktik tertentu, termasuk praktik ideologi, juga sebagai kritik untuk konteks sosial tertentu. Teks seperti “Cina”, “PKI”, film, museum, maupun undang-undang akan dilihat menggunakan konsep kekerasan budaya dari Johan Galtung dan kekerasan simbolik Pierre Bourdieu. Karena topik mengenai kekerasan budaya pasca 1965 menjadi penting untuk dibahas secara mendalam karena sampai saat ini masih banyak stigmatisasi terhadap eksil tahanan politik 1965. Hingga hari ini, ada sejarah pasca 1965 yang terpenggal atau tidak utuh dalam teks-teks resmi pemerintah. Dilansir dari *komnasham.go.id*, melalui laporan korban dan keluarga korban peristiwa 1965-1966, terbukti terdapat pelanggaran HAM berat dalam sejarah Indonesia. Sama seperti saat Soe Tjen Marching menulis *The End of Silence: Accounts of the 1965 Genocide in Indonesia* yang terbit tahun 2017, penulisan penelitian ini berupaya untuk mencegah genosida ingatan mengenai peristiwa pembantaian massal pasca 1965 dan berusaha menganalisis jenis-jenis kekerasan ini dengan pisau analisis konsep kekerasan dari Johan Galtung serta menghubungkannya dengan kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang tujuannya untuk menggali dan menjelaskan makna kedua novel yang dijadikan objek material penelitian ini. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell, 2016:4). Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*). Dalam Analisis Wacana Kritis, bahasa selain yang ada dalam teks dan ada dalam konteks digunakan sebagai alat untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk praktik ideologi (Eriyanto, 2001:4). Kemudian, dalam mengumpulkan data penelitian,

penulis menggunakan studi kepustakaan dan melakukan validitas data. Penulis juga melakukan pembacaan kritis terhadap kedua novel yang menjadi objek penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konteks Sosial Tragedi Pasca 1965 dalam Novel *Pulang* karya Leila S. Chudori**

Penulisan *Pulang* oleh Leila S. Chudori berawal dari kunjungannya ke Eropa, tepatnya Paris pada tahun 1988, setelah ia selesai menempuh studinya di Kanada. Saat itu Leila Salikha Chudori bertemu dengan beberapa eksil politik Indonesia di Paris yang tidak bisa kembali ke Indonesia. Status kewarganegaraan mereka telah dicabut. Saat itu pemerintah Orde Baru di bawah pemerintahan diktator Soeharto berupaya untuk memberangus paham komunisme, dan semua orang yang dianggap memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), baik benar-benar terlibat atau hanya terduga terlibat disingkirkan oleh Orde Baru.

Kisah *Pulang* berawal dari Hananto Prawiro yang ditangkap di Tjahaja Foto Jalan Sabang, pada tanggal 6 April 1968. Hananto Prawiro ditangkap setelah tiga tahun dalam perburuan. Hananto Prawiro terus diburu oleh pemerintah Orde Baru saat itu lantaran ia adalah pimpinan Kantor Berita Nusantara. Ia adalah jurnalis yang berpihak pada Partai Komunis Indonesia. Saat itu, Kantor Berita Nusantara ini dianggap sebagai sarang para pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI).

Maka dari itu, kantor berita ini dirazia habis-habisan oleh aparat-aparat pemerintah dan menjadi sasaran masyarakat yang anti dengan PKI. Padahal, tidak semua jurnalis atau anggota di Kantor Berita Nusantara adalah anggota atau simpatisan PKI. Sejak setelah peristiwa 30 September 1965, Hananto Prawiro pun mulai menjadi buronan.

Saat itu tokoh sentral dalam novel ini, Dimas Suryo, sedang berada dalam acara konferensi wartawan di Chile menggantikan Hananto Prawiro. Hananto Prawiro sengaja memberikan undangannya kepada Dimas Suryo lantaran ia telah tahu situasi poliitk yang terjadi. Hananto Prawiro sadar betul orang-orang yang memiliki hubungan dengan anggota atau simpatisan PKI pun jadi buronan dan dalam keadaan berbahaya. Dimas Suryo dan Nugroho yang sedang menghadiri acara konferensi wartawan di Chile dan Risjaf yang sedang menghadiri sebuah acara di Kuba tidak bisa pulang ke Indonesia.

Paspor ketiganya dicabut oleh pemerintah Indonesia, itulah alasannya. Kemudian ketiga mantan wartawan Kantor Berita Nusantara itu bertemu Tjahjadi Sukarna (Tjai Sin Soe). Mereka menyandang status eksil tahanan politik di era Orde Baru. Kemudian, mereka menamakan diri sebagai Empat Pilar Tanah Air atas usahanya mendirikan Restoran Tanah Air di Paris. Leila S. Chudori menggambarkan peristiwa ini lantaran pada tahun 1988 selepas masa studinya di Kanada, ia bertemu dengan para eksil politik di Paris, Perancis. Penulisan novel *Pulang* ini awalnya terinspirasi dari sana.

Fakta memang berbicara demikian, saat itu banyak orang yang bernasib seperti Dimas Suryo dan kawan-kawannya. Mereka yang saat peristiwa 30 September 1965 sedang di luar negeri dan “dipaksa” berstatus sebagai eksil politik (atas dasar menjadi pengikut atau simpatisan PKI dan mereka yang hanya dikait-kaitkan memiliki hubungan dengan PKI), tidak bisa pulang ke Indonesia. Dilansir dari *Tirto.id*, Henri Chambert-Loir dalam buku *Sastra dan Sejarah Indonesia* menuliskan bahwa ada alasan tertentu mengapa para eksil politik ini tidak bisa pulang ke Indonesia, saat itu paspor mereka dicabut oleh kedutaan Indonesia di negara setempat, atau walaupun mereka pulang mereka harus dipenjarakan, disiksa bahkan dibunuh di Indonesia.

Dimas Suryo yang sedang dalam perburuan pemerintah Orde Baru, menjalani hari-hari dengan penuh kecemasan. Ia harus berpindah-pindah negara sampai akhirnya ia menetap di Prancis. Ia juga mesti berpindah-pindah kota, juga mengubah pekerjaannya. Dimas Suryo dan kawan-kawannya menjadi manusia tanpa identitas, menjadi kelompok manusia *stateless*.

Selain berpusar pada kehidupan Dimas Suryo, novel ini juga bercerita mengenai Lintang Utara, anak dari Dimas Suryo dan Vivienne Deveraux. Ia besar di Prancis dan berkuliah di Universitas Sorbonne. Lintang Utara awalnya belum banyak memiliki pengetahuan mengenai negara asal ayahnya, Indonesia. Bahkan selama hidupnya 23 tahun, Lintang Utara belum pernah menginjak tanah kelahiran ayahnya tersebut. Lintang Utara kemudian berencana membuat film dokumenter tentang Indonesia atas perintah dosennya dalam rangka menyelesaikan tugas akhirnya di Universitas Sorbonne.

Adanya kebijakan Bersih Lingkungan, membuat Lintang Utara sebagai anak dari tahanan politik menyulitkan Lintang Utara. Dengan bantuan kenalan kekasihnya di

KBRI, akhirnya Lintang Utara bisa membuat visa dan terbang ke Jakarta. Kebijakan "Bersih Diri" dan "Bersih Lingkungan" memang pernah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru. "Bersih Lingkungan" yang dipertanyakan Lintang Utara menysar pada keluarga eks tahanan politik, secara tidak langsung mereka akan dinyatakan "kotor" jika ada anggota keluarganya yang menjadi tahanan politik dengan tuduhan seorang komunis.

### **Konteks Sosial Tragedi Pasca 1965 dalam Novel *Dari dalam Kubur* karya Soe Tjen Marching**

Penulisan *Dari dalam Kubur* (2020) terilhami dari karya nonfiksinya terdahulu yang berjudul *The End of Silence: Accounts of the 1965 Genocide in Indonesia* (2017). Dalam buku tersebut, Soe Tjen Marching menuliskan kesaksian-kesaksian para korban dari tragedi pasca 1965 di Indonesia, hal itu agaknya menjadi dasar penulisan novelnya *Dari dalam Kubur* (2020). Seperti tujuannya saat menulis *The End of Silence: Accounts of the 1965 Genocide in Indonesia* (2017), dengan penulisan novel ini Soe Tjen Marching tengah berusaha untuk mencegah genosida ingatan mengenai peristiwa pembantaian massal pasca 1965.

Peristiwa tragedi 1965 dan tahun-tahun sesudahnya memakan banyak korban, secara fisik maupun psikologis. Soe Tjen Marching dalam novel *Dari Dalam Kubur* juga tidak meninggalkan representasi etnis. Lantaran memang saat itu, warga Indonesia yang beretnis Tionghoa kerap kali mendapatkan diskriminasi. Berbagai stigmatisasi dilekatkan kepada orang-orang yang beretnis Tionghoa. Dalam novel tersebut, Soe Tjen Marching menggambarkan banyak hal yang sebenarnya terjadi pada etnis Tionghoa, mereka menghadapi diskriminasi dari masyarakat sekaligus kekerasan struktural dari pemerintah dengan banyaknya pelarangan dan opresi untuk menjalankan budaya mereka.

*Dari Dalam Kubur* menceritakan kepelikan hidup sebuah keluarga. Cerita berpusat pada kehidupan Karla yang selalu diperlakukan berbeda dibanding kakaknya oleh keluarganya. Karla tidak pernah diberitahu mengenai masa lalu keluarganya. Ia lahir setelah ibunya bebas dari penjara, setelah ibunya bebas dari penyiksaan yang dilakukan oleh tentara. Ibu Karla bernama Djing Fei yang kemudian keadaan memaksanya untuk berganti nama menjadi Lidya Maria. Djing Fei ditahan lantaran ia dituduh sebagai anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).

Gerwani adalah gerakan perempuan dalam melawan ketidakadilan yang besar di Indonesia pada masanya. Gerwani juga menyoroti permasalahan harga kebutuhan pokok yang tinggi, ini dianggap menjadi salah satu masalah perempuan saat itu, mereka menentang imperialisme. Gerwani tidak memisahkan antara perjuangan untuk kaum perempuan dan perjuangan menentang imperialisme. Mendekati tahun 1960an perpolitikan Indonesia semakin tegang, Gerwani dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Namun yang perlu diketahui adalah sampai pada masa terakhirnya saat gerakan perempuan tersebut diberangus oleh pemerintah Orde Baru, Gerwani tidak pernah menjadi bagian dari PKI secara resmi.

Dalam novel ini, keempat perempuan anggota Gerwani bernama Widya, Fan, Ratna, dan Bu Yatmi sudah menolong Lan Ing (adik ipar Djing Fei) keluar dari kekerasan suaminya. Namun, akibat selebaran-selebaran yang dibagikan, banyaknya orang yang diseret dan dihilangkan, orang-orang semakin percaya bahwa PKI dan Gerwani memang orang-orang bejat yang patut diberangus. Bahkan ayahnya Lan Ing sendiri percaya bahwa perempuan-perempuan yang telah menyelamatkan Lan Ing memiliki tujuan buruk.

Para tanggal 7 Oktober sampai 11 Oktober 1965, beberapa artikel harian *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* menerbitkan kabar bahwa para anggota Gerwani telah mencungkil mata para jenderal, perempuan-perempuan Gerwani dituduh telah memperkosa para jenderal bahkan memotong kelamin mereka. Seluruh anggota Gerwani disalahkan, mereka dianggap sebagai pelacur dan pelaku pembunuhan para jenderal. Padahal pada tanggal 1 Oktober, perempuan-perempuan itu duduk bersama Djing Fei, mereka sibuk bekerja dan mengurus organisasi mereka. Mereka sibuk membela perempuan-perempuan yang dipoligami dan korban kekerasan.

Kenyataan berbicara demikian, Gerwani tidak terlibat dalam peristiwa di tanggal 1 Oktober 1965. Pada 30 September malam hari, ada perintah dari partai agar beberapa perempuan Gerwani menyediakan konsumsi untuk para pelatihan Operasi Ganyang Malaysia di Lubang Buaya dan Halim. Keesokan harinya para perempuan Gerwani pulang ke kantor pusat Gerwani dengan kebingungan, mereka tidak menemukan dapur umum yang tersedia (Wierenga, 2010:425). Namun kemudian pada tanggal 11 Oktober 1965 seperti yang diceritakan Soe Tjen Marching dalam novelnya, muncul beberapa

berita yang menyebutkan Gerwani terlibat dalam pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya. Saat itu, mulai banyak kampanye-kampanye anti-Gerwani. Dilansir dari *Tirto.id*, kemudian pada tanggal 12 Oktober sampai 13 Oktober 1965, kantor-kantor Gerwani digededah dan dibakar para demonstran yang menginginkan PKI dibubarkan.

Dalam novel ini, setelah kejadian tersebut satu per satu empat perempuan itu diseret oleh orang-orang bersenjata dengan jubah hitam. Setelah Ratna hilang, mayat Fan kemudian ditemukan di semak-semak bambu oleh suaminya. Setelah itu Widya dan Bu Yatmi juga dibawa oleh para tentara. Lalu, tibalah saatnya tentara-tentara itu menjemput Djing Fei. Ia dipindahkan dari penjara ke penjara. Djing Fei dan perempuan-perempuan lain ditempatkan di sel sempit, mereka disiksa dan diperkosa oleh para tentara. Setelah menyiksa dan memperkosa, tentara-tentara ini akan meneriakkan kata “PANCASILA”. Perempuan-perempuan ini dipaksa untuk mengutuk diri mereka sendiri karena dianggapnya sudah sangat buruk. Djing Fei juga sempat diasingkan ke Kamp Plantungan, tempat para tahanan politik (tapol) perempuan diasingkan.

Kenyataan berbicara hal serupa, Kamp Plantungan menjadi tempat pengasingan tahanan politik perempuan setelah kejadian G30S 1965 (Lestariningsih, 2011:1). Berbagai aksi penyiksaan dan pemerkosaan yang dilakukan aparat Orde Baru terjadi di Kamp Plantungan. Mereka yang ditahan dan disiksa di dalam kamp tersebut bukan hanya mereka yang aktif dalam Gerwani atau perempuan anggota PKI, banyak pula orang-orang yang hanya dituduh, korban salah tangkap.

Setelah keluar dari penjara, Djing Fei mesti menghadap kodim dan ketua RT, Kartu Tanda Penduduknya harus diberikan tanda “ET” yang berarti eks tahanan politik. Setiap seminggu dua kali, Djing Fei harus menghadap ketua RT untuk diceramahi mengenai Pancasila dan dimaki-maki, kemudian dikurangi menjadi sebulan sekali pada tanggal 17. Lantaran sudah menjadi keluarga ET, Han (suami Djing Fei) harus dipecat dari kerjanya sebagai dosen di Malang.

Jika di KTP terdapat tanda “ET”, saat melamar pekerjaan eks tapol Orde Baru harus menunjukkan “Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G30S/PKI” (Ahmad, 2019:298). Para eks tapol akan kesulitan untuk mendapatkan “Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G30S/PKI” lantaran mereka sudah distigma dengan pemberitaan tanda

“ET” di KTPnya. Hal tersebut bukan saja berdampak pada kesulitan dalam banyak hal bagi eks tapol itu sendiri, namun juga berdampak pada seluruh keluarganya.

Hal tersebut mengharuskan Djing Fei untuk mengubah namanya menjadi Lydia Maria. Jika ia tidak mengubah namanya, maka identitasnya sebagai “ET” akan terus melekat, hal itu akan membahayakan anak-anaknya juga. Dengan nama baru, imbuhan “ET” di kartu identitasnya akan lenyap. Maka, tidak ada cara lain selain mengubah identitasnya agar di kemudian hari anak-anaknya tidak menemui banyak kesulitan.

Soe Tjen Marching juga dalam novel ini menceritakan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat saat itu kepada masyarakat etnis Tionghoa. Orang-orang etnis Tionghoa disebut “Cina”, seperti yang kita tahu bahwa “Cina” adalah nama negara, inilah yang membuat mereka dianggap “asing”. Salah satu bentuk diskriminasi yang diceritakan dalam novel ini adalah penutupan sekolah-sekolah Tionghoa. Pada April 1966, Djing Fei mendapat kabar bahwa sekolah tempat ia mengajar harus ditutup. Sekolah dibubarkan oleh tentara-tentara dan lantaran adanya demonstrasi dari mahasiswa.

### **Kekerasan Budaya sebagai Legitimasi Kekerasan Struktural dan Personal dalam Novel *Dari dalam Kubur dan Pulang***

#### **Diskriminasi dengan Narasi Utama Orde Baru: Ideologi Pancasila vs Komunisme**

Pancasila dijadikan asas tunggal di Indonesia, hal ini menjadi dalih bahwa pemahaman lain bisa diberangus oleh pemerintahan Soeharto. Atas nama “Pancasila” sebagai falsafah negara ini, Soeharto menyerukan agar militer (ABRI) dan Golkar yang merupakan partainya harus bersatu. Dilansir dalam *Tirto.id* dalam artikel bertajuk “Petisi Perlawanan” di harian *Republika* yang bertitimpangsa 11 November 2011, tanggal 16 April 1980 Soeharto menegaskan, “Yang mengkritik saya berarti Pancasila” di Markas Komando Pasukan Sandi Yudha, Cijantung.

Mengacu pada kata-kata tersebut, di era Orde Baru, “Pancasila” disalahgunakan dan dijadikan tameng untuk melindungi kelanggengan kuasa Orde Baru. Dalam novel *Dari dalam Kubur* juga tergambar bagaimana “Pancasila” digunakan secara tidak semestinya. Novel *Dari dalam Kubur* dan *Pulang* memberikan banyak refleksi bahwa keadaan tak semestinya seperti demikian. Digambarkan bahwa “Pancasila” digunakan untuk membenci, menghakimi, bahkan dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan.

Budaya diskriminasi kepada sekelompok masyarakat tercipta dengan terciptanya narasi tersebut.

Model teoritis Johan Galtung, yakni Kekerasan Budaya cocok digunakan untuk melihat fenomena ini. Kekerasan Budaya sebagai teori membantu memahami bagaimana ideologi “Pancasila” versi Orde Baru ini ditransformasikan ke dalam modal simbolik untuk membangun citra kelompok-kelompok tertentu menjadi “musuh negara” dan kemudian menjadi titik awal terciptanya beragam kekerasan. Selain itu, ideologi “Pancasila” yang kerap digandengkan dengan ideologi “Anti-Komunisme” ala Orde Baru ini juga dipergunakan sebagai senjata intelektual untuk mendiskreditkan perspektif paham lain yang tidak sejalan dengan pihak-pihak dominan.

### **Film sebagai Justifikasi atas Budaya Kekerasan di Masyarakat**

Berpuluh-puluh tahun di masa Orde Baru, setiap tanggal 30 September siswa-siswa di sekolah wajib menonton film *Pengkhinatan G30S/PKI* (1983). Setiap tahunnya film ini diputar di stasiun televisi saat itu. *Pengkhinatan G30S/PKI* (1983) disutradarai oleh Arifin C. Noer, diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN), serta dikomandoi oleh Brigadir Jenderal Gufran Dwipayana.

Dalam novel *Dari dalam Kubur* diceritakan saat Karla duduk di kelas 6 SD, ia dan teman-teman kelasnya diharuskan lagi menonton film *Pengkhinatan G30S/PKI*. Sekolahnya mewajibkan mereka menonton film tersebut di bioskop mewah dengan uang masing-masing. Karla sampai harus memohon-mohon pada ibunya.

Karla dan teman-temannya menyaksikan banyak adegan penuh darah. Gurunya berkata film penuh kekerasan itu adalah sejarah Indonesia. Karla dan teman sekelasnya diwajibkan untuk membuat ringkasan tentang film tersebut. Karla selalu bingung siapa membunuh siapa. Film tersebut sejalan dengan narasi-narasi sejarah versi pemerintah saat itu. Buku-buku pelajaran menggambarkan betapa jahatnya PKI.

Militer Orde Baru memahami kekuatan film sebagai alat propaganda. Menurut Ariel Heryanto oleh sebab itu maka pada tanggal 15 April 1969 Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menerbitkan keputusan mengenai “Projek Film Kopkamtib” untuk produksi film dokumenter sebagai “media *psywar*”. Sebagai upaya rekonstruksi sejarah itu, pemutaran film *Pengkhinatan G-30-*

*S/PKI* di masa Orde Baru dilakukan setiap tahun di stasiun televisi TVRI. Film itu diputar pada malam 30 September, kemudian guru-guru akan memerintahkan siswanya untuk menulis resensi mengenai film tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh Karla.

Dalam film ini diceritakan pembunuhan sadis terhadap tujuh perwira militer. Adegan yang juga terkenal adalah rekaan tentang anggota Gerwani yang menari-nari telanjang sambil bernyanyi serta merusak tubuh para jenderal di Lubang Buaya. Sosiolog Ariel Heryanto menyebutkan tidak ada materi propaganda yang menghasilkan dampak sedahsyat film *Penkhianatan G-30-S/PKI*, di layar atau di luar layar. Siswa-siswa saat itu diwajibkan untuk membeli tiket untuk menonton film tersebut pada jam sekolah.

Film ini banyak dijadikan sumber utama informasi mengenai kejadian September-Oktober 1965. Film ini membingkai kerangka induk dan menyeluruh bagi diskusi publik, angan-angan, dan kiasan sepanjang periode Orde Baru (Heryanto, 2015:122). Jika ada yang menyatakan pendapat yang berbeda dengan versi film ini, akan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum dan bisa dijatuhi hukuman penjara. Akibat dramatisasinya ini, sangat besar kemungkinannya film tersebut menjadi sangat ampuh dari narasi sejarahnya sendiri dalam upaya membentuk respons emosional dan mentransfer pesan ideologis kepada para penontonnya (Herlambang, 2019:163).

Pakar kajian budaya, salah satunya Greme Turner menyatakan bahwa film tidak lagi dapat dianggap sebagai karya seni, melainkan sebagai medium praktik sosial di mana praktik kebudayaan dan ideologi berinteraksi (Herlambang, 2019:168). Film juga disebut sebagai medium komunikasi massa di mana pesan ideologis bisa dimengerti dengan baik oleh pemirsanya. “Film sejarah” ini menjadi kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai ideologis yang dikehendaki Pemerintah Orde Baru.

Indoktrinasi melalui film yang wajib ditonton ini merupakan proses doktrin yang “tidak terlihat” yang pada kemudian hari menjadi pemicu keinginan masyarakat sendiri untuk menerima gagasan sejarah seperti yang tergambar dalam film *Pengkhianatan G30S/PKI*. Akhirnya, budaya untuk menghakimi dan kekerasan terjadi lantaran masyarakat telah didoktrinasi untuk mempercayai bahwa film tersebut adalah seutuhnya kebenaran.

### **Pelanggaran Kebencian dan Kekerasan dengan Situs Sejarah**

Sejak tahun 1968, Orde Baru terus membangun proyek-proyek untuk mengimplementasikan ideologi dari narasi utama *The Coup Attempt of the "September 30<sup>th</sup> Movement"* melalui Pusat Sejarah ABRI (Herlambang, 2019:163). Ideologi tersebut dituangkan ke domain yang praktis. Hal tersebut dapat dilihat dari dibangunnya museum-museum dan monumen-monumen yang dikaitkan dengan peristiwa 30 September 1965 sebagai ritual kebangsaan. Salah satunya dilaksanakannya proyek pembangunan monumen Pancasila Sakti dan museum di Lubang Buaya pada Desember 1965.

Museum Pancasila Sakti menampilkan sekitar 16 diorama mengenai adegan-adegan di 30 September 1965 malam sampai 1 Oktober 1965. Serta peristiwa-peristiwa setelahnya, seperti prosesi pemakaman Pahlawan Revolusi. Bangunan utamanya adalah Museum Pengkhianatan PKI dengan koleksi berupa 34 diorama yang menggambarkan sejarah PKI sejak 1945 sampai awal 1970-an. Kemudian, koleksi-koleksi di Ruang Relik menampilkan kekejaman anggota PKI dengan memperjelas berbagai siksaan yang diterima para Pahlawan Revolusi.

Kompleks Monumen Pancasila Sakti hanya menampilkan satu narasi sejarah versi rezim Orde Baru. PKI digambarkan sebagai "agen kekacauan". Hal ini nampak sekali bertujuan untuk membangun memori kolektif bangsa Indonesia. Dalam relief-relief di museum ini digambarkan kategori biner "Pancasila vs Komunisme" atau "pahlawan vs pengkhianat". Publikasi resmi pemerintah terkait museum tersebut hampir selalu diawali dengan maksud yang sama: "... kehadiran museum ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran dan kewaspadaan bangsa Indonesia terhadap bahaya Komunis yang bersifat laten" (Pusjarah TNI 2013). (Damm, 2017:120).

Semua anggota PKI digambarkan secara homogen, yakni jahat dan bengis. Transendensi PKI dalam kategori abstrak sebagai "bahaya laten" ini bahkan mencakup berbagai paham di luar Komunisme yang dianggap ingin mengacaukan dasar negara Pancasila, yakni Islam radikal di masa merebaknya isu Komando Jihad (Damm, 2017:120).

Monumen tersebut masih ramai dikunjungi hingga saat ini, ini menjadi bukti bahwa pemanfaatan "bangunan" sebagai investasi politik berjalan efektif. Diorama pada museum tersebut mengangkat ketokohan Soeharto dalam mengembalikan tatanan. Dalam

relief-relief di museum tersebut, terlihat ada pengontrasan antara Soeharto dan Soekarno. Soeharto sebagai penegak Pancasila, dan Soekarno sebagai seseorang yang memberi tempat bagi Komunisme. Pengategorian biner ini seolah berbicara yang satu “baik” dan yang lain “buruk”.

Dengan indoktrinasi tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara yang berhubungan dengan “PKI” dilucuti. Penembatan “PKI” sebagai “liyan” terus diproduksi sejak masa Orde Baru, bahkan sampai sekarang. Salah satunya diproduksi melalui adanya bangunan ini. Hal ini dikatakan Kekerasan Budaya lantaran kehadirannya sebagai bagian dari produk budaya menggiring penikmatnya pada kekerasan terhadap manusia lain. Adanya monumen ini melanggengkan kepercayaan bahwa sekelompok orang memang sekeji yang digambarkan diorama-diorama di dalamnya, sehingga muncul anggapan semua orang yang berhubungan dengan “komunisme” atau “PKI” mesti diberangus.

### **Penindasan Budaya dan Politik Etnis Tionghoa di Masa Orde Baru**

Pengendalian sejarah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa salah satunya dengan pelarangan mengenai penggunaan huruf dan bahasa Cina itu tertuang dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 49/U/IN/8/1967. Aturan tersebut berisi larangan penerbitan dan percetakan tulisan maupun iklan dengan huruf serta bahasa Cina. Tidak sebatas di media massa, namun selanjutnya peraturan larangan berhuruf dan berbahasa Cina ini diterapkan dalam ranah pribadi, meski digunakan di rumah itu dilarang.

Suryadinata (2010) mengatakan bahwa pada masa Orde Baru, etnis Tionghoa mengalami pemaksaan asimilasi dengan “budaya Indonesia” (Suharyo, 2013:1). Termasuk dalam hal nama-nama orang Tionghoa di Indonesia. Memang, tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai masyarakat etnis Tionghoa mesti berganti nama. Namun, ada trauma-trauma yang dirasakan etnis Tionghoa jika menggunakan nama aslinya, nama mereka pun diubah menjadi nama-nama yang terdengar “lokal”. Hal ini karena kebudayaan Tionghoa sudah dilarang dan sudah ada semacam budaya yang mendiskriminasi mereka menjadi orang “asing”.

Hal ini terjadi pada Djing Fei yang harus berganti nama menjadi Lydia Maria beserta keluarganya dalam novel *Dari dalam Kubur* (2020). Memang tidak ada aturan yang mengharuskan Djing Fei dan keluarganya berganti nama. Namun lantaran KTP

Djing Fei sudah bercapkan tanda “ET” yang menyulitkannya dan keluarganya untuk memiliki kehidupan yang layak dan tidak dikucilkan, diubahlah nama tersebut.

Ada pula perbandingan mana “Jawa” dan mana “Tionghoa” yang dialami Karla di sekolahnya berdasarkan ciri-ciri fisik. Termasuk ada anggapan bahwa “Cina” biasanya makan di restoran-restoran mahal dan menonton film di bioskop yang mahal, dan “Jawa” sebaliknya. Padahal, Karla sebagai keluarga Tionghoa juga memiliki kehidupan yang sederhana bahkan terkadang kebutuhan-kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Tionghoa yang banyak disoroti semasa Orde Baru adalah Tionghoa-Tionghoa yang kaya raya, padahal banyak pula Tionghoa yang hidup sederhana, bahkan ditindas. Mereka banyak menjadi pebisnis, lantaran di masa itu etnis Tionghoa tidak bisa memperoleh pekerjaan-pekerjaan yang bekerja di sektor publik, seperti guru, ustaz, pendeta, TNI, Polisi, bahkan pejabat-pejabat negara lainnya.

### **Kekerasan Budaya dan Simbolik dalam Novel Pulang dan Dari dalam Kubur**

Kekerasan Budaya dari Johan Galtung dan Kekerasan Simbolik dari Pierre Bourdieu secara tidak langsung terkait secara definisi. Kekerasan Budaya terjadi saat aspek-aspek budaya seperti ideologi, agama, bahasa, seni, dan pengetahuan digunakan untuk membenarkan kekerasan personal dan kekerasan struktural. Mirip seperti Kekerasan Budaya, kekerasan simbolik adalah kekerasan yang tidak kasat mata. Kekerasan jenis ini tidak terlihat seperti kekerasan pada umumnya, namun seringkali dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Kekerasan ini berawal dari adanya dominasi wacana dari pihak yang berkuasa. Kekerasan jenis ini diterima dengan baik oleh pihak yang menindas maupun yang ditindas, sehingga perlu adanya pembongkaran secara serius terkait hal di balik dominasi ini.

### **Kaitan Kekerasan Budaya dan Kekerasan Simbolik**

Sama seperti Johan Galtung, Pierre Bourdieu menyatakan bahwa kekerasan terjadi dalam ruang lingkup “kekuasaan”. Kekerasan ini menjadi hasil dari praktik-praktik kekuasaan lantaran ada pihak yang berkuasa (menjadi pihak yang mendominasi) dan yang tidak berkuasa (pihak yang didominasi). Kekerasan dilakukan oleh pihak dominan untuk melanggengkan kekuasaannya. Pihak yang dominan ini berusaha agar kekerasan sebagai bentuk dominasinya tidak dikenali. Maka dari itu cara kekerasan fisik tidak dijadikan

sebagai satu-satunya cara agar kekuasaannya langgeng. Kekerasan dilakukan secara perlahan sampai kelas yang didominasi tidak sadar mereka sedang dijadikan objek kekerasan (Martono, 2012:39). Dalam hal inilah dilakukan Kekerasan Simbolik.

Bourdieu sendiri secara bergantian mengungkapkan istilah “kekerasan simbolik”, “kuasa simbolik”, dan “dominasi simbolik” untuk merujuk kepada hal yang sama (Martono, 2012:40). Arti dari konsep tersebut terletak pada upaya aktor-aktor sosial dominan menerapkan suatu makna sosial dan representasi realitas yang diinternalisasikan kepada aktor lain sebagai sesuatu yang alami dan absah, bahkan makna sosial tersebut kemudian dianggap benar oleh pihak yang didominasi (Martono, 2012, 39).

Simbol sebagai bagian dari produk budaya dapat merepresentasikan kekerasan. Simbol dalam hal ini dapat berupa pengetahuan, seni, bahasa, dan sebagainya. Bourdieu dalam buku *Language and Symbolic Power* menulis, “Kekuatan Simbolik adalah kekuatan dalam mengonstruksi kenyataan, dan sebuah kekuatan yang cenderung membentuk urutan gnoseologi.” (Herlambang, 2019:39). Simbol memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi norma-norma yang ada di masyarakat.

Simbol-simbol kebudayaan, salah satunya ideologi negara, dapat digunakan untuk mempertahankan kepentingan negara dalam menciptakan serta melanggengkan dominasi antar kelas-kelas subordinat. Nilai moral ideologis tersebutlah yang disebut oleh Bourdieu sebagai modal simbolik yang bertindak bekerja sebagai sumber krusial kekuasaan serta dieksploitasi oleh para pemegang kekuasaan untuk melanggengkan dominasi mereka (Herlambang, 2019: 43-44).

Salah satu simbol penting di masa Orde Baru adalah ideologi Pancasila. Pancasila dijadikan ideologi tunggal untuk mempersatukan wilayah kepulauan Indonesia dari ancaman separatisme dan untuk memperkuatnya dari ideologi anti-ekstrimis, misalnya terhadap komunisme dan fundamentalisme Islam. Namun, Pancasila juga disalahgunakan sebagai pembenaran atas penindasan terhadap manusia lain. Misalnya saja pada novel *Dari dalam Kubur* digambarkan saat dipenjara, Djing Fei dan perempuan-perempuan lain ditempatkan di sel sempit, mereka disiksa dan diperkosa oleh para tentara. Setelah menyiksa dan memperkosa, tentara-tentara ini akan menceramahi perempuan-perempuan ini agar menjadi manusia yang bermoral. Mereka meneriakkan kata “PANCASILA”.

Pada masa Orde Baru, nilai-nilai Pancasila direduksi dan digunakan sebagai simbol kekuasaan. Nilai-nilainya dibuat kabur (*blurred*) dengan banyaknya praktik penyimpangan dan berbagai kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pancasila (Rohani, 2019:80). Ideologi negara ini mengalami mistifikasi, menjadi rigid dan mutlak pemaknaannya. Artinya, jika tidak sesuai dengan pemaknaan penguasa, maka makna tersebut dianggap salah atau “sesat” (Rohani, 2019:79). Maka dari itu, dalam novel *Dari dalam Kubur* memberi gambaran bahwa penganut ideologi lain dianggap “sesat” atau mesti kembali ke jalan yang benar, meski mereka tidak melakukan tindak kejahatan. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut Bourdieu sebagai “Kekerasan Simbolik”.

Kekerasan Simbolik dapat dilakukan dengan mekanisme Eufimisme dan Sensorisasi. Eufimisme merupakan mekanisme Kekerasan Simbolik yang tidak tampak atau dilakukan secara halus dan tidak mudah dikenali. Beberapa bentuknya bisa berupa kewajiban, kepercayaan, kesetiaan, sesuatu yang dianggap kesopanan, amal, pemberian dan lain-lain (Damayanti, dkk.,2019:224). Mekanisme Eufimisme ini bekerja dengan dasar kewajiban dan kebaikan. Kemudian Eufimisme bekerja dengan menciptakan situasi kognitif subjek dengan keadaan tidak memiliki pilihan selain melakukan satu hal tertentu. Nilai-nilai pihak dominan disebarkan untuk bisa memperkuat kekuasaannya.

Kemudian, Sensorisasi adalah suatu mekanisme Kekerasan Simbolik yang menjadikan sesuatu tersebut nampak sebagai sebuah cara melestarikan “kehormatan moral” dan dipertentangkan dengan “kerendahan moral” yakni nilai-nilai yang tidak diharapkan oleh pihak yang berkuasa atau pihak dominan. Dengan dua mekanisme tersebut, Kekerasan Simbolik dinilai sebagai cara untuk menegakkan kebenaran atau kebaikan.

## **Kesimpulan**

*Pulang* dan *Dari dalam Kubur* sama-sama menggambarkan pembantaian massal terhadap kelompok komunis dan yang di-komunis-kan serta diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Kekerasan tersebut dilegitimasi oleh beragam kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru dan dilanggengkan dengan produk budaya seperti bahasa, produksi film, dan pembangunan monumen. Hadirnya penggunaan produk budaya tersebut menjadikan

adanya Kekerasan Budaya. Oleh karena itu, Kekerasan Struktural, Personal, dan Budaya tidak dapat dipisahkan dalam kasus ini.

Kekerasan budaya dari Johan Galtung ini memiliki kesamaan dengan gagasan kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu. Sama seperti kekerasan budaya, kekerasan simbolik adalah kekerasan yang tidak kasat mata. Kekerasan jenis ini tidak terlihat seperti kekerasan pada umumnya, namun seringkali dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Kekerasan ini berawal dari adanya dominasi wacana dari pihak yang berkuasa. Kekerasan jenis ini diterima dengan baik oleh pihak yang menindas maupun yang ditindas, sehingga perlu adanya pembongkaran secara serius terkait hal di balik dominasi ini.

Kekerasan Budaya sekaligus Kekerasan Simbolik terjadi saat Orde Baru memakai berbagai produk budaya ini untuk menormalisasi atau melegitimasi aksi kekerasan personal seperti pembantaian “komunis” dan kekerasan strukturalnya seperti menerbitkan beragam kebijakan yang merepresi kelompok-kelompok tertentu. “Legitimasi” berarti bahwa kekerasan yang dilakukan Orde Baru tersebut bisa dibenarkan melalui produk kebudayaan yang fungsinya untuk mengubah nilai moral dan ideologis masyarakat agar mereka menganggap kekerasan yang terjadi adalah normal, bahkan harus dilakukan.

### Daftar Pustaka

- (n.d.). Retrieved from <https://tirto.id/nasib-eksil-1965-pilih-tidak-pulang-atau-dijagal-soeharto-ex44>
- (n.d.). Retrieved from <https://tirto.id/petisi-50-menggugat-soeharto-yang-menyalahgunakan-pancasila-cLtN>
- (n.d.). Retrieved from <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/10/6/1587/menyoal-pelanggaran-ham-yang-berat-peristiwa-1965-1966.html>
- Ahmad, T. (2019). Produksi dan Reproduksi Memori: Pengalaman Keluarga Eks Tahanan Politik PKI di Sulawesi Selatan. *Jurnal Walasuji*, 9(2).
- Cresswell, W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, G., & dkk. (2019). Mekanisme Eufimisme dan Sensorisasi: Kekerasan Simbolik dalam Tuturan Dosen. *Jurnal Retorika*, 12(2).
- Damm, M. (2017). Lubang Buaya, Kuburan Para Pahlawan: Abjeksi dalam Historiografi Peristiwa 1 Oktober 1965. *Jurnal Antropologi Indonesia*(2).
- Endraswara, S. (2011). *Metodologi Penelitian Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

- Eriyanti, D. L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1).
- Faruk. (2012). *Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3).
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Herlambang, W. (2019). *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Heryanto, A. (2015). *Identitas dan Kenikmatan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Lestariningsih, A. D. (2011). *GERWANI: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Marching, S. T. (2020). *Dari Dalam Kubur*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Martono, N. (2012). *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Menéndez-Menénde, M. I. (2014). Cultural Industries and Symbolic Violence: Practices and Discourses that Perpetuate Inequality. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 161, 64-69.
- Molan, B. (2009). Hannah Arendt: Kekerasan bukan Tindakan Politik, Namun bukan tanpa. *Jurnal RESPONS*, 14(1), 45-64.
- Nurgiantoro, B. (2010). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali.
- Rohani, E. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Wonosobo: Gema Media.
- Semi, M. A. (2012). *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: CV Angkasa.
- Springs, J. A. (2016). The Cultural Violence of Non-violence. *Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis*, 3(1).
- Suharyo. (2013). Pola Nama Masyarakat Keturunan Tionghoa. *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, 18(2).
- Turama, A. R. (2014). Pergeseran Kekuasaan Negara dan Relasi Antarsubjek dalam Cerpen Orde Baru dan Reformasi. *Jurnal Poetika*, 2.
- Wahyudi, T. (2013). Sosiologi Sastra Alan Swingewood: Sebuah Teori. *Jurnal Poetika*, 1(1).
- Wellek, R., & Warren, A. (2014). *Teori Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wierenga, S. E. (2010). *Penghancuran Gerakan Perempuan*. Yogyakarta: Galangpress.

